

PERAN PARTAI POLITIK DALAM PARTISIPASI PEREMPUAN DI KOTA MAKASSAR

(Kasus Partai Perindo Dan Partai PDIP)



ANDI ANNISA HERMANSYAH

NIM: E031191073



**DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

**PERAN PARTAI POLITIK DALAM PARTISIPASI PEREMPUAN DI KOTA MAKASSAR
(Kasus Partai Perindo Dan Partai PDIP)**

**ANDI ANNISA HERMANSYAH
E031191073**



**DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**PERAN PARTAI POLITIK DALAM PARTISIPASI PEREMPUAN DI KOTA MAKASSAR
(Kasus Partai Perindo Dan Partai PDIP)**

SKRIPSI

**ANDI ANNISA HERMANSYAH
NIM: E031191073**

Skripsi,

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana 2024 pada tanggal bulan tahun dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada



**DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

**PERAN PARTAI POLITIK DALAM PARTISIPASI PEREMPUAN DI KOTA
MAKASSAR (KASUS PARTAI PERINDO DAN PARTAI PDIP)**

**ANDI ANNISA HERMANSYAH
E031191073**

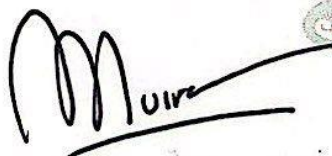
Skripsi,

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana 2024 pada tanggal bulan tahun dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada

Departemen Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Mengesahkan

Pembimbing I



Musrayani Usman, S.Sos., M.Si.
NIP: 198408242019032011

Pembimbing II

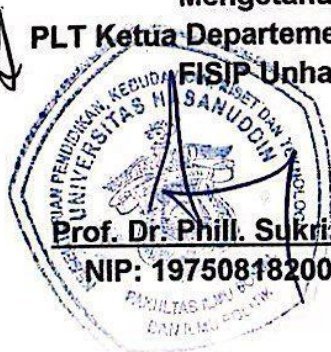


Hasriashari Rahim, S.Sos., M.Si.
NIP: 198405072021073001

Mengetahui,

PLT Ketua Departemen Sosiologi

FISIP Unhas



Prof. Dr. Phill. Sukri, SIP., M.Si
NIP: 197508182008011008

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Andi Annisa Hermansyah
2. NIM : E031191073
3. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Jurusan : Sosiologi
5. Judul Skripsi : **PERAN PARTAI POLITIK DALAM PARTISIPASI PEREMPUAN DI KOTA MAKASSAR (KASUS PARTAI PERINDO DAN PARTAI PDIP)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiarisme, pencurian hasil karya orang lain, hasil kerja orang lain untuk kepentingan saya karena hubungan material maupun non-material, ataupun segala kemungkinan lain yang pada hakekatnya bukan merupakan karya tulis skripsi saya secara orisinal dan otentik.

Bila dikemudian hari diduga kuat ada ketidaksesuaian antara fakta dengan kenyataan ini, saya bersedia diproses oleh tim Fakultas yang dibentuk untuk melakukan verifikasi, dengan sanksi terberat berupa pembatalan kelulusan/kesarjanaan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran sendiri dan tidak ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun demi menegakkan integritas akademik di institusi ini.

Hormat Saya,



Andi Annisa Hermansyah

ABSTRAK

Andi Annisa Hermansyah, E031191073. Peran Partai Politik Dalam Partisipasi Perempuan Di Kota Makassar (Kasus Partai Perindo Dan Partai PDIP). Dibimbing oleh Musrayani Usman, S.Sos., M.Si. dan Hariashari Rahim, S.Sos.M.Si. Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Partai Perindo dan Partai PDIP dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kota Makassar. Studi ini mengkaji berbagai aspek keterlibatan perempuan dalam struktur partai, pencalonan dalam pemilihan, peran dalam pengambilan keputusan, serta pengaruh dalam pembentukan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan afirmatif kuota 30% keterwakilan perempuan dalam partai politik, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan utama yang diidentifikasi meliputi hambatan kultural, psikologis, dan ekonomi. Partai Perindo sebagai partai politik yang relatif baru, memiliki strategi khusus dalam merekrut kader perempuan untuk meningkatkan partisipasi politik. Sementara itu, Partai PDIP, yang memiliki sejarah panjang dalam politik Indonesia, berusaha mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan politik.

Penelitian ini menemukan bahwa peran perempuan dalam partai politik masih sering terbatas pada pemenuhan kuota tanpa memberikan kesempatan yang setara dalam pengambilan keputusan. Partai politik perlu melakukan upaya lebih untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi perempuan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam partisipasi politik perempuan di Kota Makassar, masih diperlukan usaha yang lebih signifikan dari partai politik untuk benar-benar memberdayakan perempuan dalam ranah politik.

Kata kunci: Partisipasi politik, perempuan, Partai Perindo, Partai PDIP, Kota Makassar, kebijakan afirmatif.

ABSTRACT

Andi Annisa Hermansyah, E031191073. The Role of Political Parties in Women's Participation in Makassar City (The Case of the Perindo Party and the PDIP Party). Supervised by Musrayani Usman, S.Sos., M.Sc. and Hariashari Rahim, S. Sos., M.Sc. Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This research aims to analyze the role of the Perindo Party and the PDIP Party in increasing women's political participation in Makassar City. This study examines various aspects of women's involvement in party structures, candidacy in elections, roles in decision making, and influence in policy formation. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews, observation and documentation studies.

The research results show that even though there is an affirmative policy of a 30% quota for women's representation in political parties, the implementation of this policy still faces various obstacles. The main barriers identified include cultural, psychological and economic barriers. The Perindo Party, as a relatively new political party, has a special strategy in recruiting female cadres to increase political participation. Meanwhile, the PDIP Party, which has a long history in Indonesian politics, is trying to maintain and increase women's involvement in various political activities.

This research found that the role of women in political parties is still often limited to fulfilling quotas without providing equal opportunities in decision making. Political parties need to make more efforts to overcome these obstacles and create a more inclusive environment for women. The conclusion of this research is that although there has been progress in women's political participation in Makassar City, more significant efforts are still needed from political parties to truly empower women in the political realm.

Key words: Political participation, women, Perindo Party, PDIP Party, Makassar City, affirmative policy.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	2
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	3
ABSTRAK	4
DAFTAR ISI	6
DAFTAR TABEL.....	8
KATA PENGANTAR.....	10
BAB I.....	12
1.1. Latar Belakang	12
1.2. Rumusan Masalah.....	14
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian.....	15
1.5. Tinjauan Pustaka.....	15
1.5.1. Partai Politik	15
1.5.3 Gender Dan Politik	18
1.5.2. Stereotipe.....	18
1.5.3. Teori Keterwakilan perempuan Anne Philips.....	19
1.6. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	19
Table 1.4 Penelitian yang Relevan.....	20
1.7. Kerangka Pikir.....	21
1.8. Definisi Konseptual.....	22
BAB II.....	24
2.1. Tipe dan Dasar Penelitian jelaskan dengan hasil penelitian.....	24
2.1.1. Tipe Penelitian.....	24
2.1.2. Dasar Penelitian	24
2.2. Waktu dan Lokasi Penelitian	24
2.3. Teknik Penentuan Informan	25
2.4. Sumber Data	25
2.4.2. Data Sekunder	26
2.5. Teknik Pengumpulan Data	26
2.6 Analisis Data	26
BAB III.....	28
3.1. Karakteristik Informan.....	28
3.2. Hasil Penelitian.....	29
3.3. Perempuan dalam rekrutmen Politik	30
3.3.1. Ras dalam Rekrutmen Kader baru.....	31
3.3.2. Agama Dalam Perekrutan Kader Baru	32
3.4. Kebijakan Afirmatif 30% Keterwakilan Perempuan	32
3.5. Pengambilan Keputusan Kader (Pengurus) Perempuan dalam kepengurusan.	33
3.5.1. Keterlibatan Pengurus Perempuan di partai politik Pada Periode 2019-2024.....	36

BAB IV	38
4.1. Peran parpol dalam menghadapi stereotipe kebijakan 30%.....	38
4.2. Analisi teori Keterwakilan Perempuan dalam afirmatif kebijakan 30%.....	39
4.2.1. Proses Pengambilan Keputusan Pengurus Perempuan	40
4.3. Perbedaan kedua partai Partai Perindo dan Partai PDIP	41
BAB V	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	48

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah keseluruhan anggota DPRD dan anggota perempuan DPRD Kota Makassar tahun 2019-2024	15
Tabel 1.2 komposisi anggota DPRD Kota Makassar dalam dua periode terakhir.....	16
Tabel 1.3 perbedaan antara Partai Perindo dan Partai PDIP terkait hambatan kultural, psikologis,dan ekonomi.....	24
Table 1.4 Penelitian yang Relevan	28
Table 2.1 Waktu Penelitian	38
Tabel 3.1 Informan	47
Tabel 4.1 Perbedaan antara (Perindo) dan (PDIP) terkait kebijakan afirmatif 30%.....	83

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul; Peran Partai Politik Dalam Partisipasi Perempuan Di Kota Makassar (Kasus Partai Perindo Dan Partai PDIP). sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana tingkat strata satu (S1) pada Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Atas dukungan berbagai pihak, terutama kepada Ibu **Murrayani Usman, S.Sos., M.Si** selaku penasihat akademik sekaligus dosen pembimbing I dan bapak **Hariashari Rahim, S.Sos., M.Si.** selaku dosen pembimbing II, terima kasih yang sebesar besarnya penulis ucapkan atas segala bimbingan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sejak awal sampai selesai. Tidak lupa juga kepada bapak **Prof. Hasbi Marissangan. P.hD.** dan Bapak **Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si.** selaku dosen penguji yang sangat supportif dengan kehangatannya, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada.

1. Terima kasih kepada orang tua saya dan saudara saya yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa tanpa henti. Kalian adalah sumber kekuatan dan inspirasi saya.
2. Terima kasih kepada Ibu **Murrayani Usman, S.Sos., M.Si.**, dan Bapak **Hasriashari Rahim, S.Sos., M.Si.**, atas bimbingan, kesabaran, dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan dan nasihat kalian sangat berarti bagi saya.
3. **Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin** Terima kasih atas segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama masa studi saya di departemen Sosiologi.
4. Ketua partai DPC PDIP dan partai Perindo, beserta Anggota kader perempuan partai PDIP dan partai Perindo yang sudah meluangkan waktu untuk membantu kelancaran pengerjaan penelitian skripsi penulis
5. Kepada **angkatan 2019 sosiologi**, terimakasih sering memberikan kehangatan, semangat tanpa henti kepada penulis.
6. Kepada **Tetap Waras**, teman teman yang sudah lulus tapi masih memberikan semangat untuk penulis agar tetap bertahan mengerjakan skripsi.
7. Kepada Staff akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta staf akademik Departemen Sosiologi atas segala bantuan dalam hal administrasi, terkhusus bapak **Pasmudir**, ibu **Rosnaini**, dan bapak **Hidayat** yang memudahkan dalam penyusunan berkas studi maupun kegiatan selama
8. Kepada **Kintan Amara**, dan **A.Aprinina**. Dua orang yang saling menguatkan untuk bisa melewati masa-masa perkuliahan, terimakasih penulis sampaikan yang tak terhingga.
9. Kepada **Opet**, salah satu teman yang sangat saya sayangi, ucapan terimakasih dari hati yang paling tulus dari penulis, banyak hal yang opet bantu sampai penulis bisa di titik ini, terimakasih.
10. Kepada **Five** terimakasih karena telah hadir ketika penulis lagi butuh teman cerita.
11. Teman **TikTok** penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan satu satu. Banyak kasih yang penulis ingin sampaikan, terimakasih untuk hiburannya, terimakasih untuk waktu luang teman teman, terimakasih untuk lagu lagu indah yang penulis putar dari komentar teman teman. Banyak hal dan banyak kesyukuran yang penulis rasakan dari kalian.
12. Untuk **jumawan alfadillah** salah satu dari banyaknya orang yang *let in go*, tapi cuman dia yang banyak membuktikan penulis dari semester dua sampai sekarang masih menemani. Terimakasih tak terhingga penulis sampaikan untuk hal hal yang buat penulis nyaman.
13. Untuk kucing penulis **Popol, Fixie, 2B.** terimakasih sudah jadi teman untuk membantu penulis menghilangkan stress penulis. I love you so, tolong hidup lebih lama, dan untuk yang sudah pergi terlebih dulu, penulis rindu, rindu sekali.
14. **Antang Pride**, teman temanku terimakasih banyak, banyak keceriaan yang saya rasakan di dekat kalian, semoga sampai mati terjalin persaudaraan penulis dengan kalian.
15. Last but not least untuk diri sendiri terimakasih sudah mau bertahan, banyak cerita yang kita lewatkan bukan? Walaupun belum bisa lulus 3,5 tahun. Tapi saya bangga sekali sama Andi

Annisa!!!.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga dalam penyusunan skripsi ini, penulis sebagai manusia yang jauh dari kata sempurna menyadari adanya keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pembaca di andiannisaher@gmail.com. Akhir kata, semoga segala yang terkandung dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembacanya, terima kasih.

Makassar, 08 Agustus 2023

Andi Annisa Hermansyah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Membangun masyarakat sipil berarti memperjuangkan ruang publik yang di dalamnya mencakup seluruh warga Negara baik laki-laki maupun perempuan tanpa adanya pengecualian. Demokrasi di Indonesia telah berkembang sejak Reformasi tahun 1998 dan memberikan kesempatan lebih besar bagi partisipasi politik masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan partisipasi, terutama dalam hal kesetaraan gender dan keterlibatan perempuan dalam proses politik.

Sistem politik kita selama ini, kebijakan berlaku menempatkan perempuan hanya sebagai *second person*. Rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik mengakibatkan berbagai kepentingan perempuan kurang terakomodasi dalam sejumlah keputusan politik, karena sejumlah keputusan politik yang dibuat cenderung berwatak maskulin dan patriarkal, sementara sebagian besar keputusan politik yang dibuat selalu melibatkan perempuan sebagai sasarannya.

Berdasarkan berbagai penelitian terdapat contoh kasus yang menunjukkan bahwa sejumlah keputusan politik yang dibuat cenderung berwatak maskulin antara lain contoh kasus dari penelitian Shinta Kartika Sari (2022). Keterwakilan Perempuan Kader PDI Perjuangan Dalam Pemilu Legislatif 2019 Di DPRD DKI Jakarta bahwa, para perempuan yang berada di partai politik dan dinominasikan sebagai kader oleh partainya menyebutkan hambatan yang mereka rasakan antara lain adalah kriteria sangat maskulin yang diterapkan, tidak ada kriteria yang memasukkan kerja khas perempuan, yang artinya kekuasaan dominan ada di tangan laki-laki yang lebih diutamakan untuk menjadi anggota legislatif, yang mana perempuan biasanya hanya di jadikan sebagai pelengkap persyaratan dan sekadar memenuhi undang-undang (sistem kuota 30% tersebut).

Contoh kasus yang kedua penelitian dari Fajar Apriani (2013). keterwakilan perempuan dalam kancah politik (studi kasus pendapat perempuan kota samarinda) bahwa Perempuan juga sebagai warga negara memiliki hak untuk dapat menyampaikan pendapat dan juga berhak memperoleh tanggapan mengenai aspirasi dan harapannya dalam kancah politik. Suara perempuan yang selama ini hampir tidak terakomodasi dengan baik memperoleh kesempatan melalui pemberian kuota sebesar 30% dalam badan legislatif.

Dari kedua contoh kasus di atas, dapat dikatakan bahwa hak suara Perempuan didalam ranah politik cukup minim dibandingkan dengan laki-laki yang memberikan pendapat dan masukan. Dapat dikatakan bahwa beberapa alasan tersebut membuat perempuan mempertimbangkan ingin berpartisipasi kedalam dunia politik karena kebanyakan partai hanya menjadikan Perempuan untuk memenuhi persyaratan afirmatif 30%, tanpa melibatkan Perempuan sebagai peran penting didalam partai tersebut.

“Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali”. Demikian penegasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 sebagai hukum tertinggi. Demokrasi dianggap menjadi tidak demokrasi ketika terdapat sekelompok masyarakat atau golongan tersingkir dan tidak terwakili dalam Lembaga perwakilan hasil pemilihan umum. Jumlah penduduk Perempuan hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia, merupakan potensi yang sangat besar untuk menunjang pembangunan di Indonesia. Kenyataannya Perempuan masih jauh tertinggal dengan laki-laki disegala bidang kehidupan. Hal ini mendorong pemikiran untuk melahirkan kebijakan aturan yang memberikan *affirmative* terhadap Perempuan (artina, dessy 2012).

Sejak era reformasi telah diupayakan kebijakan *affirmative action* dengan menerapkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam ranah legislatif. Hal ini memberikan dampak positif terhadap Representasi perempuan parlemen dalam pemilihan umum 1999 hingga pemilu terakhir 2019. Pada Pemilu 1999 (9,0%), Pemilu 2004 (11,09%), Pemilu 2009 (17,86%), Pemilu 2014 (17,32%) dan Pemilu 2019 (20,05%) (A Aulya, 2022).

Kuota 30% keterwakilan perempuan antara lain diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik . Pasal 2 ayat (2) UU Parpol menyatakan bahwa pendirian dan pembentukan partai

politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Selain itu, keterwakilan paling sedikit 30% untuk perempuan juga menjadi salah satu syarat dalam penyusunan kepengurusan parpol untuk tingkat pusat (Maryuni, 2014).

Dapat dilihat hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar telah menunjukkan 50 caleg terpilih yang akan mengisi kursi DPRD Kota Makassar periode 2019-2024. Diantaranya terdapat jumlah keseluruhan anggota perempuan DPRD Kota Makassar sebanyak dua belas anggota caleg yang terpilih dalam periode 2019-2024, Mereka dari 13 partai yang ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2019 beserta jumlah keseluruhan anggota dan anggota perempuan legislatif.

Tabel 1.1 Jumlah keseluruhan anggota DPRD dan anggota perempuan DPRD Kota Makassar tahun 2019-2024

No	Partai	Jumlah anggota keseluruhan DPRD Kota Makassar	Jumlah anggota perempuan DPRD Kota Makassar
1	Nasdem	6 anggota	-
2	Demokrat	6 anggota	2 Anggota
3	PDIP	6 anggota	2 Anggota
4	Golkar	5 anggota	1 Anggota
5	Gerindra	5 anggota	2 Anggota
6	PAN	4 anggota	-
7	PPP	5 anggota	1 Anggota
8	PKS	5 anggota	2 Anggota
9	Hanura	3 anggota	1 Anggota
10	PKB	1 anggota	-
11	Perindo	2 anggota	1 Anggota
12	demokrasi kebangsaan	1 anggota	-
13	Partai Berkarya	1 anggota	-
14	total	50 anggota	12 anggota

Sumber : (Dewan Perwakilan Rakyat Kota Makassar Kareba Parlemen, 2022)

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut terjadi peningkatan jumlah anggota DPRD perempuan bila dibandingkan hasil pemilihan umum tahun 2014, yaitu terjadi peningkatan dari 8 (delapan) orang meningkat menjadi 13 (tiga belas) orang untuk periode 2019-2024. (Nur Azzah Fadila S. dan Alimuddin, 2022).

Tabel 1.2 komposisi anggota DPRD Kota Makassar dalam dua periode terakhir

No.	PARTAI POLITIK	Jumlah Kursi dalam Periode	
		2014-2019	2019-2024
1.	PKB	0	1
2.	Gerindra	5	5
3.	PDI-P	4	6
4.	Golkar	8	5
5.	NasDem	(baru) 5	6
6.	Berkarya		(baru) 1
7.	PKS	5	5
8.	Perindo		(baru) 2

9.	PPP	5	5
10.	PAN	4	5
11.	Hanura	5	3
12.	Demokrat	7	6
13.	Demokrasi Kebangsaan		1
14.	PBB	1	0
15.	PKPI (termasuk PKP)	1	0
	Jumlah Anggota	50	50
	Jumlah Partai	11	13

sumber: (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, 2022)

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut terjadi peningkatan jumlah anggota DPRD dan jumlah Partai pada tahun 2014-2019 dan periode 2019-2024. Hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar telah menunjukkan 3 caleg perempuan terpilih pada kedua partai. Diantaranya partai PDI-P terdapat dua orang dan Partai Perindo terdapat satu orang yang akan mengisi kursi DPRD Kota Makassar periode 2019-2024.

Studi kasus dalam penelitian ini akan berfokus pada kedua partai politik tersebut, yaitu Partai Perindo dan Partai PDIP. Alasan peneliti mengambil kedua partai tersebut dikarenakan partai Perindo merupakan partai politik yang relatif baru dan mulai mendapatkan perhatian di tingkat nasional. Sementara itu, Partai PDIP adalah salah satu partai politik yang memiliki sejarah panjang setelah reformasi tahun 1998.

Peran perempuan dalam partisipasi politik di kedua partai ini menjadi fokus utama penelitian ini. Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana partisipasi politik perempuan dalam Partai Perindo dan Partai PDIP di Kota Makassar. Dalam konteks ini, partisipasi politik perempuan mencakup berbagai aspek, seperti keterlibatan dalam struktur partai, pencalonan dalam pemilihan, peran dalam pengambilan keputusan, dan pengaruh dalam pembentukan kebijakan.

Terdapat beberapa penelitian yang menyimpulkan tentang peran perempuan dalam partisipasi politik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Yogi Maulana Malik (2017) dalam menjalankan perannya di politik kaum perempuan mengalami beberapa hambatan didalam menjalankan perannya. Secara umum terdapat tiga hambatan yang dialami kaum perempuan dalam menjalankan perannya yaitu hambatan kultur sosial masyarakat, hambatan psikologis, dan hambatan ekonomi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shinta Kartika Sari (2022). Hambatan pertama adalah hambatan kultural atau sosial budaya. Secara kultural, perempuan diidentikkan sebagai orang yang pemalu, takut, dan suka menangis. Sedangkan laki-laki identik dengan berani, pantang menyerah, dan tidak pernah menangis. Inilah yang menyebabkan perempuan mempunyai kendala dalam melakukan komunikasi politik.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Oktavia Dwi Sucipto : 2019) terkait perempuan dan politik (studi kasus partai perindo DKI Jakarta dalam Perekrutan Massa Perempuan) memfokuskan strategi rekrutmen perempuan di partai perindo dimulai dengan mempersiapkan kader perempuan guna menarik massa yang kemudian untuk memilih perindo, kemudian diajak atau diikutsertakan dalam melakukan kegiatan ditengah masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis kendala dan faktor pendukung yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan di kedua partai tersebut. Dari uraian di atas memberikan gambaran tentang partisipasi perempuan dalam partai politik di kota Makassar yang munculnya banyak problematika terhadap perempuan ketika terjun didalam dunia politik, maka dari itu penelitian ini akan berfokus pada Peran Partai Politik Dalam Partisipasi Perempuan Di Kota Makassar khususnya di Partai Perindo Dan Partai PdiP.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana peran Partai Perindo dan Partai PDIP dalam menghadapi stereotip gender kebijakan

- 30% dalam partisipasi politik perempuan di Kota Makassar?
2. Bagaimana pengambilan keputusan kader (pengurus) perempuan dalam kepengurusan partai politik di kota makassar terkhusus di Partai Perindo Dan PDI-P?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui;

1. Peran Partai Perindo dan Partai PDIP dalam menghadapi stereotip gender kebijakan 30% dalam partisipasi politik perempuan di Kota Makassar.
2. Pengambilan keputusan kader (pengurus) perempuan dalam kepengurusan partai politik di kota makassar terkhusus di Partai Perindo Dan PDIP.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang kemudian akan dilaksanakn ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Menjadi salah satu pijakan dasar bagi pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi kedepannya terkait permasalahan partisipasi perempuan dalam politik di Kota Makassar.
2. Menjadi sumber informasi dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan dan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap celaah penelitian sebelumnya guna memperkaya kajian partisipasi perempuan dalam politik diKota Makassar.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Partai Politik

Kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokkan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, atau bahkan kepentingan. Pengelompokkan itu berbentuk organisasi secara umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Dalam perkembangannya, kata partai lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik (Kurniawan, 2018).

Secara umum partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi atau nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik pasal 1 berbunyi sebagai berikut: "Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan organisasi masa yang salah satu fungsinya memberikan perubahan cara pandang berpolitik pada masyarakat melalui salah satunya adalah Pendidikan politik. Selain fungsi partai politik terdapat juga tugas partai politik, hanya partai politik yang dapat menjalankan tugas untuk menciptakan program melalui kompromi yang berlaku untuk seluruh masyarakat. Kompromi tersebut dicapai setelah mempertemukan berbagai kepentingan dan nilai yang berbeda setelah mempertimbangkan tindakan-tindakan masyarakat sipil dan asosiasi-asosiasi yang ada di dalam masyarakat.

Partai politik juga mempunyai tugas untuk melakukan perundingan, dan untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan masyarakat dengan tindakan Negara. Partai politik bisa menjalankan tugas ini karena hanya partai politik yang berakar dalam kehidupan politik masyarakat sipil dan pada saat yang sama menanamkan pengaruh di lembaga-lembaga negara, parlemen dan pemerintah yang mana program-program politik dan hukum mendapatkan keabsahannya.

Dalam negara demokrasi, hubungan antara negara dan rakyat harus merupakan cerminan simbiosis mutualistik, artinya hubungan tersebut harus saling bergantung dan saling menguntungkan. Hubungan akan nampak jelas ketika sistem politik yang dikembangkan negara memberi ruang gerak yang cukup bagi aktivitas politik masyarakat. Sistem politik tersebut salah satunya terdiri dari infrastruktur

politik.

Infrastruktur politik merupakan suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan dimana dalam kegiatannya dapat memengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing. Di dalam infrastruktur politik terdapat beberapa komponen didalamnya antara adalah partai politik.

Kota Makassar, sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, memiliki peranan penting dalam politik dan pemerintahan daerah. Kota Makassar menyaksikan perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam konteks ini partai politik memegang peranan krusial sebagai lembaga yang menggerakkan proses politik dan menggalang partisipasi publik. Di kota Makassar, dua partai politik yang menonjol adalah Partai PDI Perjuangan (PDI-P) dan Partai Perindo.

Perindo (Partai Persatuan Indonesia) adalah salah satu partai politik di Indonesia yang didirikan pada tahun 2014 oleh Hary Tanoesoedibjo. Perindo memiliki orientasi politik yang nasionalis, dengan tujuan membangun Indonesia yang lebih kuat, maju, dan sejahtera. Dalam pemilihan umum legislative 2019, Perindo berhasil memperoleh 3 kursi di DPR RI. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah partai politik yang didirikan oleh Megawati Soekarnoputri pada tahun 1999. PDIP memiliki orientasi politik yang nasionalis dan berhaluan kiri, dengan tujuan memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan kepentingan nasional. Dalam pemilihan umum legislatif 2019, PDIP berhasil menjadi partai politik dengan jumlah suara dan memperoleh 128 kursi di DPR RI.

Meskipun memiliki orientasi politik yang berbeda, baik Perindo maupun PDIP sama-sama berpartisipasi dalam pemilihan umum dan politik nasional di Indonesia. Kedua partai tersebut juga memiliki program dan agenda politik masing-masing untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan kemajuan negara. Partai Perindo dan PDI-P dipilih sebagai kasus penelitian karena keduanya juga memiliki pengaruh besar terhadap mendorong partisipasi politik perempuan.

1.5.2 Partisipasi Politik Perempuan

Secara umum partisipasi politik dapat dikatakan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah. Dalam UU No. 2 tahun 2008, dituliskan bahwa partai politik harus menyertakan perempuan minimal 30% dalam pengurusan ataupun pendiriannya (Anifatul Kiftiyah, 2019).

Demi mencapainya suatu keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi politik di parlemen atau lembaga politik untuk itu, perludanya dukungan langsung dari masyarakat dalam praktik politik sehingga para kaum perempuan bisa dengan percaya diri membuktikan dan mengimplementasikan langsung bahwa mereka pantas terjun dan berkecimpung langsung dengan dunia politik. Pada dasarnya partisipasi politik perempuan adalah kegiatan sukarela kaum perempuan yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik.

Kaukus ini terdiri dari berbagai unsur, antara lain pemerhati politik, aktivis perempuan, dosen, perempuan parlemen, kader perempuan partai politik dan lain sebagainya, sehingga dalam kaukus ini mereka mengambil bagian pada proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum (Warjiyati, 2016).

Secara umum, partisipasi tidak hanya pada bidang politik, akan tetapi dalam segala bidang kehidupan, karena perempuan mempunyai hak dan kewajibannya untuk ikut serta atau berpartisipasi aktif, sehingga dibutuhkan perjuangan keras dan keseluruhan dari segenap perempuan dalam segala lini, terlebih pada lini politik yang sangat berpengaruh terhadap produk kebijakan. Sampai saat ini antara perempuan dan politik masih merupakan hal yang sulit untuk dipersatukan. Di satu sisi perempuan dituntut untuk berkontribusi dalam pembangunan, tapi di sisi lain juga perempuan dituntut untuk tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan. Partisipasi politik perempuan merupakan faktor penting dalam mencapai kesetaraan gender di arena politik. Undang-undang Dasar Republik Indonesia sendiri tidak membatasi partisipasi dan keterwakilan politik perempuan (Rizki Priandi, K. R. 2019).

Peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan sangat ditentukan oleh partai politik yang bersangkutan, sehingga reformasi di level partai politik merupakan langkah strategis dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Hal ini mengemuka sebagai hasil setiap

pertemuan-pertemuan yang dilakukan pada kaukus perempuan politik di Jawa Timur. Kebijakan internal parpol utamanya di tingkat pusat sangat mempengaruhi posisi dan keterwakilan perempuan di parpol sebagai caleg, maupun sebagai anggota legislatif (UNDP, 2010).

Keterwakilan perempuan di bidang legislatif bukan hanya masalah kesetaraan dan keadilan gender antara perempuan dan laki-laki saja. Dengan adanya keterwakilan perempuan diharapkan akan melahirkan keputusan-keputusan yang tidak bias gender serta agar perempuan dapat berperan aktif dalam pembangunan. Hal ini terjadi karena masih adanya hambatan baik yang bersifat kultural, struktural, Psikologis, maupun ekonomi yang menghadang perempuan. Walaupun sistem kuota sudah diberlakukan, akan tetapi keterwakilan perempuan masih rendah.

Tabel 1.3 perbedaan antara Partai Perindo dan Partai PDIP terkait hambatan kultural, psikologis, dan ekonomi

perbedaan antara Partai Perindo dan Partai PDIP terkait hambatan kultural, psikologis, dan ekonomi		
Jenis hambatan	Partai Perindo	Partai PDIP
1. Kultural	Partai Perindo menghadapi pandangan masyarakat yang masih menganggap bahwa perempuan tidak seharusnya terjun dalam urusan politik. Dalam internal partai, perempuan masih merasakan tindakan diskriminasi dalam pengambilan keputusan	PDIP juga menghadapi stereotip kultural yang mengidentikkan perempuan sebagai individu yang pemalu dan tidak berani, yang menyebabkan kendala dalam komunikasi politik
2. Psikologis	Hambatan psikologis di Perindo termasuk rendahnya rasa percaya diri perempuan untuk bersaing dengan laki-laki, terutama dalam posisi yang dominan secara politik. Interaksi sosial antar pengurus masih merasakan sikap yang belum sampai ketahap kekeluargaan.	Di PDIP, perempuan juga mengalami hambatan psikologis serupa, di mana mereka merasa kurang percaya diri untuk berkompetisi dalam lingkungan politik yang didominasi oleh laki-laki. Interaksi sosial di partai PDIP masih merasakan diskriminasi dalam pengambilan keputusan.
3. Ekonomi	Hambatan ekonomi di Partai Perindo meliputi modal ekonomi yang rendah, yang membuat perempuan sulit untuk berkompetisi secara efektif dalam politik	PDIP juga menghadapi hambatan ekonomi, namun mereka lebih menekankan pada keterbukaan tanpa memandang status ekonomi, meskipun tantangan tetap ada dalam hal modal politik untuk kampanye

Meskipun baik Perindo maupun PDIP menghadapi hambatan kultural, psikologis, dan ekonomi dalam meningkatkan partisipasi perempuan, pendekatan mereka berbeda karena latar belakang dan struktur partai yang berbeda. Perindo, sebagai partai baru, cenderung lebih fleksibel dan inovatif dalam mengatasi hambatan, sementara PDIP, dengan sejarah panjangnya, menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam mengubah budaya dan struktur tradisionalnya.

Partisipasi politik perempuan adalah kegiatan sukarela kaum perempuan yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik. Kaukus ini terdiri dari berbagai unsur, antara lain pemerhati politik, aktivis perempuan, dosen, perempuan parlemen, kader perempuan partai politik dan lain

sebagainya, sehingga dalam kaukus ini mereka mengambil bagian padaproses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

1.5.3 Gender Dan Politik

Kata "Gender" berasal dari bahasa Inggris, gender yang berarti "jenis kelamin". Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dalam memahami konsep gender, Mansour Fakih membedakannya antara gender dan seks (jenis kelamin). Pengertian seks lebih condong pada pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia berdasarkan ciri biologis yang melekat, tidak dapat dipertukarkan. Dalam hal ini sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat (Saparinah, 2010).

Terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk melihat hubungan dan peran antara laki-laki dan perempuan diantaranya. Pertama, *nature* teori ini yang beranggapan bahwa peran laki-laki dan perempuan merupakan peran yang telah digariskan oleh alam. Perumpamaan sifat positif ditujukan bagi laki-laki sedangkan yang negatif bagi perempuan. Kedua, *nurture* teori yang beranggapan bahwa peran laki-laki dan perempuan merupakan hasil konstruksi masyarakat patriarki dimana peran laki-laki begitu sangat menguntungkan dibanding perempuan.

Ketidakadilan ini menjadikan para feminis memperjuangkan kesetaraan perempuan yang cenderung mengejar kesamaan kuantitas dalam segala bidang. Ketiga, *equilibrium* teori yang menekankan konsep kemitraan dan keharmonisan antara laki-laki dan perempuan. Penerapan teori *equilibrium* dengan melihat masalah konteksual dan situasional bukan berdasarkan perhitungan kuantitas dan kuota (Sasongko, 2007).

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa gender adalah peran antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya. Suatu peran maupun sifat dilekatkan kepada laki-laki karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan biasanya peran maupun sifat tersebut hanya dilakukan atau dimiliki oleh laki-laki dan begitu juga dengan perempuan. Suatu peran dilekatkan pada perempuan karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan bahwa peran atau sifat itu hanya dilakukan oleh perempuan.

Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembagian peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Perbedaan gender pada prinsipnya adalah sesuatu yang wajar sebagai sebuah fenomena kebudayaan. Perbedaan itu tidak akan menjadi masalah jika tidak menimbulkan ketidakadilan (Hartanto dan Astuti, 2022).

1.5.2. Stereotipe

Kata stereotip berasal dari gabungan dua kata Yunani, yaitu *stereos* yang berarti padat-kaku dan *typos* yang bermakna mode. Sehingga stereotip dapat dikatakan sebagai suatu bentuk hambatan yang ada di dalam komunikasi antar budaya. Samovar & Porter dalam Ilyas (2010), mengemukakan bahwa stereotip ialah persepsi atau kepercayaan yang dianut mengenai kelompok atau individu berdasarkan pendapat dan sikap yang lebih dulu terbentuk.

Dengan kata lain, stereotip ialah penggeneralisasian pada individu yang ada pada suatu kelompok tanpa informasi yang memadai dengan mengabaikan ciri individu-individu yang berada pada kelompok tersebut. Stereotip identik terhadap perbedaan, ras, etnis, suku-suku, kelompok kepercayaan/agama sikap komunikasi (Ilyas Lampe, 2017).

Stereotip dapat berbentuk positif maupun negatif. Stereotip yang ditujukan pada sekelompok orang sebagai orang malas, jahat, kasar dan bodoh merupakan bentuk stereotip negatif. Akan tetapi terdapat juga stereotip dalam bentuk positif, yakni pandangan pelajar dari Asia yang berkelakuan baik, pekerja keras, dan pandai (Fatimah Saguni, 2014).

Dari pengertian tersebut, stereotip dapat diartikan sebagai suatu penilaian atau persepsi yang bersifat subjektif dan dapat membentuk kesan positif maupun negatif terhadap seseorang. Akan tetapi, stereotip sering dimaknai dalam bentuk negatif karena stereotip sering muncul karena tidak benar benar mengenal seseorang atau kelompok tertentu.

Stereotip sebagai suatu konsep yang berkaitan dengan peran gender dapat diilustrasikan sebagai

gambaran bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah, emosional, dan pasif, sedangkan laki-laki makhluk yang kuat, jantan, perkasa, dan rasional. Kedudukan ini sebetulnya agak berbeda dalam dunia politik, dimana perempuan punya hak yang sama dan sudah dijamin oleh undang-undang. Keseriusan dan kesiapan perempuan justru yang sangat penting untuk dipersiapkan, sehingga label perempuan lemah dalam politik tidak sepenuhnya benar. Keseriusan berpolitik bagi perempuan dengan menunjukkan kiprah yang lebih dibandingkan perempuan biasa yang ada dalam keluarga dan bukan aktivis perempuan (Suci Triana, 2017).

Stereotip gender mengacu pada praktik yang memberikan atribut, karakteristik, atau peran tertentu pada seorang perempuan atau laki-laki hanya dengan alasan keanggotaannya dalam kelompok sosial perempuan atau laki-laki. Stereotip gender salah jika mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Kesiapan perempuan yang berpolitik diharapkan mampu memiliki pengetahuan yang cukup dalam politik, sosial, negara, kemasyarakatan.

Stereotip dalam politik dapat mempengaruhi pandangan dan penilaian orang terhadap individu atau kelompok tersebut, bahkan tanpa alasan yang jelas. Stereotip dalam politik dapat menjadi berbahaya karena dapat mempengaruhi sikap dan keputusan politik seseorang, bahkan jika sikap dan keputusan tersebut tidak didasarkan pada kenyataan atau fakta. Hal ini dapat memperkuat ketidaksetaraan dan diskriminasi dalam politik, dan membatasi kemampuan individu atau kelompok tertentu untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik (Muhammad, 2017).

1.5.3. Teori Keterwakilan perempuan Anne Philips

Profesor Anne Phillips adalah salah satu ahli teori politik paling terkemuka. Dia menulis tentang isu-isu demokrasi dan keterwakilan, kesetaraan, multikulturalisme, dan perbedaan, ia identik dengan pendirian sub-disiplin 'teori politik feminis'.

Menurut Anne Philips perempuan memiliki kelengkapan yang terbaik untuk mewakili kepentingan perempuan dalam ranah politik. Masuknya Perempuan di dalam struktur politik diperlukan untuk memberi perempuan kekuatan politik dimasyarakat. Philips membagi kehadiran tersebut menjadi 2 sifat yaitu deskriptif, substantif. Kehadiran deskriptif mengacu kepada kehadiran fisik perempuan didalam lembaga politik, ekonomi, dan sosial. Kehadiran mereka menjadi symbol perempuan ada dilembaga tersebut sesuai ketentuan kuota. Sedangkan kehadiran substantif adalah kehadiran wakil perempuan berusaha sebaik mungkin atas keinginan dan kehendak orang-orang yang diwakilinya (Fauzi, 2016).

Keterwakilan perempuan menurut Anne Philips pondasi dasar bagi politik seluruh Masyarakat dan adanya kontrol publik yang kuat terhadap keberlangsungan politik, sehingga perlu keterwakilan secara langsung dari kalangan minoritas (perempuan) dalam lembaga-lembaga negara (Ambarwati, 2021). Anne berpendapat bahwa kelompok yang termajinalkan misalnya perempuan atau kulit hitam, harus secara fisik terwakili dengan jumlah yang proposional sesuai dengan populasinya dilembaga legislatif.

Dalam teori ini, anggota dari kelompok yang termarginalisasi semestinya secara fisik terwakili dalam lembaga legislatif dengan jumlah yang proposional dengan populasinya. Lebih besar kelompok perempuan sangat penting tidak hanya karena mereka secara otentik merepresentasikan anggota kelompok mereka, tetapi karena mereka dapat mengubah agenda dan membawa perspektif baru dalam politik kebijakan.

Anne Philips berpendapat bahwa terdapat empat hal untuk mendorong keterwakilan. Pertama adalah representasi simbolik, yaitu menaruh kelompok-kelompok marjinal menjadi komponen penting agar mereka bisa berpartisipasi. Kedua adalah bagaimana calon legislatif dapat menghidupkan isu-isu yang tidak pernah diangkat sebelumnya. Ketiga dalam rangka mengubah pola representasi, ada kebutuhan dari kelompok diluar parlemen untuk berkontribusi terhadap kebijakan. Keempat adanya beberapa isu yang belum masuk dalam agenda yang disalurkan partai politik (Sari, 2018).

1.6. Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang terkait dengan topik penelitian ini tentu sudah ada dan pernah dilakukan sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai partisipasi perempuan dalam dunia politik. Adapun dibawah ini merupakan hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang akandilakukan.

Table 1.4 Penelitian yang Relevan

No.	Nama	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yogi Maulana Malik/2017	Analisi Peran perempuan dalam partai politik di dewan pimpinan cabang partai deokrasi Indonesia perjuangan (DPC PDIP) kota Cirebon	Kulitatif	Dalam penelitian ini mencakup dua pembahasan yaitu melihat bagaimana peran perempuan di dalam kepengurusan dan melihat bagaimana proses pencalonan legislatif yang berlangsung apakah sudah responsif gender atau belum. Pembahasan peran perempuan mencakup tingkat peran kader perempuan dalam kepengurusan partai sedangkan pembahasan mengenai proses pencalonan legislatif mencakup alur proses pencalonan kader perempuan dari tingkat bawah sampai atas
2.	Shinta Kartika Sari/2022	Keterwakilan perempuan kader PDI Perjuangan dalam pemilu legislaif 2019 di DPRD DKI Jakarta	Kualitatif	Representasi perempuan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dalam Pemilu Legislatif 2019 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan hasil penelitian perannya cukup signifikan menunjukkan representasi dari perempuan serta juga sudah memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dan sudah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

3.	OktaviaDwi Sucipto/201 9	Perempuan Dan Politik (Studi tentang Partai Perindo DKI Jakarta Dalam Perekrutan Massa Perempuan	Kualitatif	Strategi rekrutmen yang dilakukan partai perindo untuk mendapatkan suara perempuan di Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan dari partai itu sendiri. Partai perindo sangat mendukung adanya peraturan kuota 30% untuk perempuan. Dengan begitu besar harapan partai perindo bisa mengambil massa perempuan dalam pemilihan legislatif 2019
----	--------------------------------	---	------------	--

Ketiga penelitian di atas memiliki fokus tema yang sama dengan penelitian ini, yaitu mengenai perempuan dalam partisipasi politik. Adapun penelitian pertama yang dilakukan oleh Yogi Maulana Malik (2017) menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian ini berfokus pada Analisis Peran perempuan dalam partai politik di dewan pimpinan cabang partai demokrasi Indonesia perjuangan (DPC PDIP) kota Cirebon yang dimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara umum sangat berpihak kepada perempuan karena tidak ada pembandingan antara perempuan dan laki-laki. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Shinta Kartika Sari (2022) menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian ini berfokus pada Keterwakilan perempuan kader PDI Perjuangan dalam pemilu legislatif 2019 di DPRD DKI Jakarta dimana partai PDIP telah melakukan kaderisasi khusus keterwakilan perempuan, dan dalam struktur kepartaian telah mengedepankan adanya keterwakakilan perempuan disetiap jajaran kepengurusan. Sedangkan penelitian yang tidak dilakukan oleh Oktavia Dwi Sucipto (2019) menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian ini berfokus pada Perempuan Dan Politik (Studi tentang Partai Perindo DKI Jakarta Dalam Perekrutan Massa perempuan) dimana partai Perindo telah melakukan sistem dan mekanisme rekrutmen untuk merekrut pengurus dan anggota serta menjelaskan perekrutan yang dilakukan Perindo dalam menarik massa perempuan.

Adapun perbedaan yang mendasar yang membedakan penelitian ini dengan ketiga penelitian diatas adalah terletak pada lokasi dimana penelitian berlangsung. Sasaran dari penelitian ini adalah kader perempuan, kouta tercapainya 30%, dan stereotip gender, dan aktivitas gender. Sedangkan tiga penelitian yang relevan sasaran utamanya adalah peran dan rekrutmen perempuan dalam kepengurusan partai, dan untuk mengetahui tercapainya kebijakan afirmatif 30% setiap partai. Pada penelitian ini peneliti ingin mengatahui latar belakang terjadinya stereotip gender dipartai politik, dan aktivitas gender yang ada didalam lingkup kepengurusan partai politik. Selain itu peneliti akan berusaha menyelidiki apakah kuota 30% perempuan dalam rekrutmen partai politik sudah tercapai tanpa melihat stereotip individu dilihat dan apakah terdapat tindakan intimidasi antara pengurus perempuan dan pengurus laki-laki dengan menggunakan teori keterwakilan perempuan oleh Anne Phillips.

1.7. Kerangka Pikir

Pada setiap penelitian pasti diperlukan adanya kerangka berpikir sebagai pijakan atau sebagai pedoman dalam menentukan arah dari penelitian, hal ini diperlukan agar penelitian tetap terfokus pada kajian yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut digunakan untuk memberikan konsep dalam pelaksanaan penelitian di lapangan, alur kerangka berpikir yang dibuat oleh peneliti pada penelitian ini akan dideskripsikan sebagai berikut.

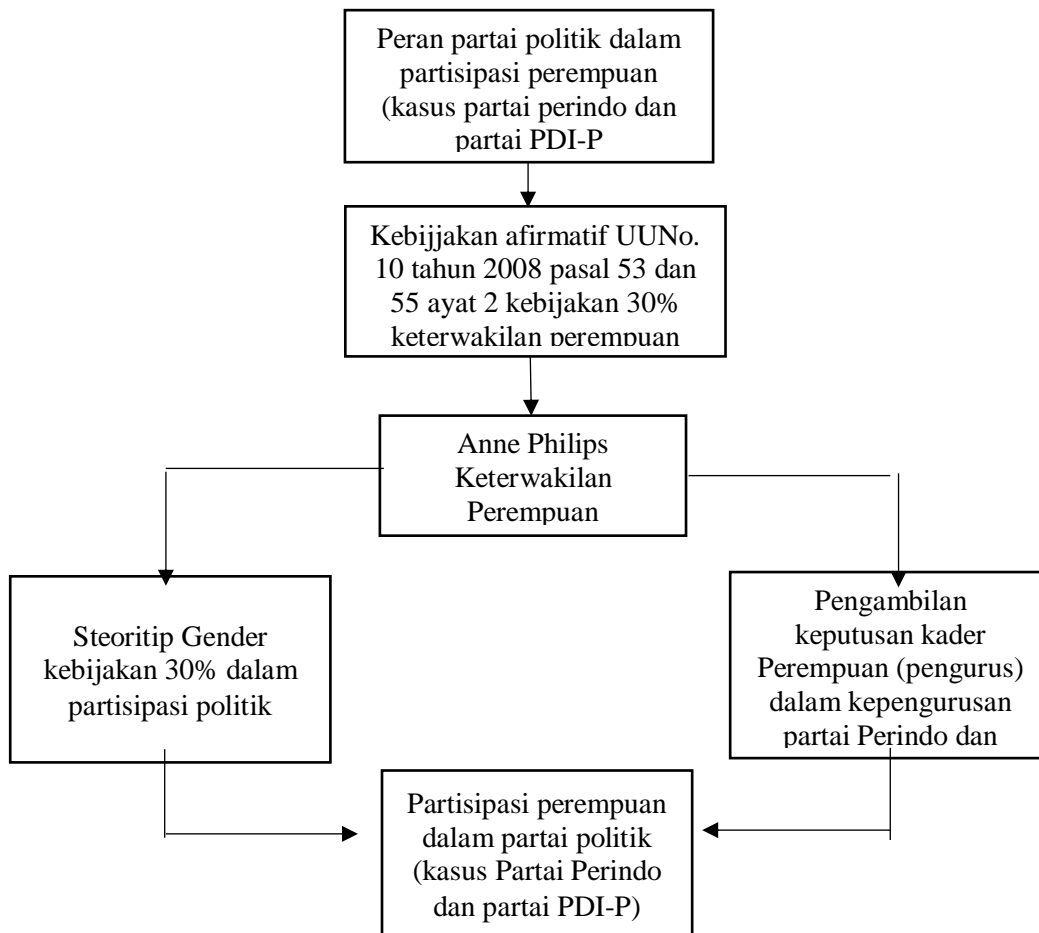
Peran Partai politik dalam Partisipasi perempuan dapat diartikan sebagai keikutsertaan kaum perempuan dalam bidang politik, baik berpartisipasi secara langsung di dalam dunia politik seperti aktif di dalam keanggotaan partai politik maupun kegiatan sosial yang berbau politik. Partisipasi politik perempuan dapat ditunjukkan melalui ikut berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya di dalam pemilihan umum seperti pada pemilihan presiden tahun 2009.

Kebijakan afirmatif UUNo. 10 tahun 2008 pasal 53 dan 55 ayat 2 sangat penting untuk partai

politik dikarenakan terdapat mekanisme diskualifikasi sebagai peserta pemilu jika kepengurusan ditingkat pusat perempuan tidak memenuhi kuota 30%, salah satu hambatan partai politik tidak memenuhi kebijakan afirmatif tersebut dikarenakan adanya stereotip masing masing partai

Terdapat teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, teori keterwakilan perempuan oleh Anne Phillips yang digunakan dalam penelitian ini. Partisipasi politik perempuan dalam politik memiliki beberapa faktor penghambat yang menyebabkan perempuan tidak bergerak bebas dalam dunia politik yaitu dari segi stereotip gender serta adanya sensitivitas gender dalam pengambilan keputusan.

Faktor penghambat dari segi stereotip gender ini menjadikan perempuan hanya sekedar makhluk lemah yang tidak boleh berkarir dan dituntut untuk hanya mengurus urusan rumah tangga serta adanya stigma yang terjadi di masyarakat bahwa perempuan tidak harus bersekolah atau berpendidikan tinggi, sedangkan faktor penghambat dari segi sensitivitas gender sebagaimana diketahui bahwa pengambilan keputusan di Indonesia, baik di legislative maupun di eksekutif didominasi laki-laki. Kedua hambatan tersebut berhubungan dapat menjadi faktor peningkatan atau bahkan tidak adanya keterlibatan partisipasi perempuan dalam partai politik. Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



1.8. Definisi Konseptual

Partai politik menurut Robert (dalam Hanafi, 2018) Partai politik adalah sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita bersama. Mereka

mengelompokkan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, atau kepentingan. Pengelompokan ini berbentuk organisasi yang bisa dibedakan menurut wilayah aktivitasnya.

Konstruksi sosial menurut (Saparinah, 2010) masih kental diperbincangkan di masyarakat terlebih persoalan gender. Istilah gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat dan kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Stereotipe menurut (Ilyas Lampe, 2017) adalah gambaran atau persepsi umum yang melekat pada sekelompok orang berdasarkan karakteristik tertentu, seperti gender, ras, agama, atau budaya, yang sering kali tidak akurat dan bersifat menyederhanakan. Stereotipe ini dapat muncul dari asumsi atau generalisasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kelompok tersebut.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1. Tipe dan Dasar Penelitian jelaskan dengan hasil penelitian

2.1.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu sebuah pendekatan yang interpretive karena hasil yang diperoleh bersifat interpretasi berdasarkan data yang diperoleh saat dilapangan (Sugiyono, 2019). Menurut Mantra dalam bukunya Moeleong (Siyoto & Sodik, 2015) pendekatan penelitian kualitatif sebagai suatu rangkaian kegiatan yang menghasilkan data yang sifatnya deksriptif berupa kata-kata/kalimat pernyataan dari individu-individu yang dikenai fokus permasalahan selama dilapangan.

pendekatan penelitian kualitatif ini juga memberikan pemahaman bahwa penekanan terhadap aspek pemahaman secara mendalam terhadap permasalahan yang diteliti dari pada melihatnya secara general. Oleh karena itu, pendekatan penelitian kualitatif ini digunakan sebagai alat untuk menginterpretasikan atau menjelaskan makna yang terkandung dalam setiap ungkapan orang-orang yang terlibat dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini akan diamati, dianalisis, dan dituliskan mengenai Peran Partai politik Dalam Partisipasi Perempuan Di kota makassar (Kasus Partai perindo Dan Partai PDIP).

2.1.2. Dasar Penelitian

Dasar penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian studi kasus adalah proses pengumpulan data dan informasi tentang orang, peristiwa, latar sosial, atau kelompok secara rinci, intensif, holistik, dan metodis dengan menggunakan berbagai metode dan teknik serta berbagai sumber informasi untuk memahami secara efektif bagaimana orang, kejadian, latar sosial itu beroperasi atau berfungsi sesuaidengan konteksnya (Sugiyono, 2013).

Studi kasus merupakan salah satu strategi penelitian memperhatikan semua aspek yang penting dari suatu kasus yang diteliti. Dengan menggunakan strategi ini akan dapat memahami latar belakang suatu persoalan ataupun mengungkap gambaran yang mendalam dan mendetail tentang suatu objek maupun situasi. Kasus yang akan diteliti dapat berupa individu, suatu peristiwa serta kelompok lain yang sifatnya terbatas, sehingga peneliti dapat memahami dan mengerti objek itu berfungsi sesuai dengan konteksnya (Sugiyono, 2013).

Dengan menggunakan studi kasus, peneliti hendak memahami gejala tertentu dalam masyarakat dan melihat suatu kasus secara keseluruhan serta peristiwa yang nyata untuk mencari kekhususannya ataupun arti yang mendalam terhadap kasus tersebut (Raco, 2010). Adapun dalam penelitian ini, dasar penelitiannya studi kasus dengan maksud mendalami dan mengungkap gambaran mengenai praktik Peran Partai Politik Dalam Partisipasi Perempuan Di kota Makassar (Kasus Partai Perindo Dan Partai PDIP).

2.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama tiga bulan, yakni dimulai pada bulan Mei sampai dengan Juli 2024. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh peneliti, lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kantor Dpc Partai Perindo Kota Makassar dan Kantor Dpc Partai PDIP Kota Makassar.

Berikut adalah proses yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian yang akan berlangsung pada waktu yang telah direncanakan.

Table 2.1 Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1.	Penyusunan Proposal						

2.	Seminar Proposal						
3.	Pengurusan izin penelitian						
4.	Penentuan informan						
5.	Observasi Penelitian						
6.	Pengumpulan data						
7.	Pengolahan data						
8.	Pengerjaan hasil laporan						
9.	Bimbingan laporan						
10.	Seminar hasil penelitian						

2.3. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* atau yang didefinisikan oleh Sugiyono sebagai teknik penentuan informan dengan adanya pertimbangan tertentu. Teknik penentuan informan berdasarkan *purposive sampling* dilakukan dengan cara memilih informan berdasarkan karakteristik, kriteria, ciri ataupun sifat tertentu. Dengan demikian, pemilihan informan dilakukan dengan penuh pertimbangan terlebih dahulu dan bukan secara acak dan informan tersebut dianggap peneliti paling mengetahui mengenai permasalahan yang akan diteliti karena memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono 2013).

Peneliti menggunakan *purposive sampling* untuk mencari informan kunci. Informan kunci dipilih oleh peneliti dari orang yang paling mengetahui informasi di Kantor Dpc Partai Perindo dan kantor Dpc Partai PDIP sehingga informan inilah yang dianggap peneliti dapat mengetahui apa saja yang melatar belakangi terjadinya praktik peran Partai Perindo dan Partai PDIP dalam menghadapi stereotip gender yang menghambat partisipasi politik perempuan dan sensitivitas gender dalam pengambilan keputusan kader (pengurus) perempuan dalam kepengurusan partai politik di kota makassar terkhusus di Partai Perindo Dan PDI-P. Penelitian ini ingin mengetahui dan menggambarkan praktik perempuan dalam partisipasi politik di kota makassar. Oleh karena itu, dirumuskan kategori informan, sebagai berikut.

1. Kader (Pengurus) perempuan di partai Perindo dan partai Pdpip.
2. Pengurus (Ketua partai) Perindo dan Partai PDIP.

2.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut (Sugiyono, 2019) adapun definisi dari data primer dan data sekunder, sebagai berikut.

2.4.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan fenomena yang hendak diteliti. Untuk itu, data primer ini diperoleh melalui informan yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi atau data.

- a. Hasil Observasi, yaitu dilakukan untuk mengetahui kondisi Peran Partai Politik Dalam Partisipasi Perempuan Di Kota Makassar (Kasus Partai Perindo Dan Partai PDIP)
- b. Hasil wawancara mendalam yang dilakukan pada informan. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua Partai dan Pengurus inti Perempuan yang termasuk dalam Peran Partai Politik dalam Partisipasi Perempuan Di kota Makassar (Kasus Partai Perindo dan Partai PDIP)
- c. Hasil Dokumentasi, yaitu dilakukan untuk mengabadikan setiap momen yang dibuat oleh Pengurus Partai Perindo dan Partai PDIP Dan Ketua Partai Perindo dan Partai PDIP di Kota

Makassar.

2.4.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mengacu pada informasi yang diperoleh di luar objek penelitian, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber baik dalam bentuk dokumentasi, laporan instansi yang terkait dengan penelitian, jurnal, surat kabar, majalah, buku, jurnal, sosial media dan lainnya yang membahas mengenai Partai Politik Dalam Partisipasi Perempuan.

2.5. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode yang digunakan, data penelitian ini diperoleh dari data yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ada tiga yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan.

a. Wawancara Mendalam

Menurut Susan Staunback (Sugiyono, 2019) mengemukakan dengan wawancara mendalam pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama sehingga akan menghasilkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang partisipan dan menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.

Metode wawancara mendalam ini digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi-informasi dari informan secara lebih detail dan terperinci dalam menggambarkan Peran Partai Politik Dalam Partisipasi Perempuan Di Kota Makassar (Kasus Partai Perindo Dan Partai PDIP).

Segala sumber informasi ada pada informan, untuk metode ini perlu untuk dilakukan agar peneliti bisa mendapatkan informasi benar adanya dan sumbernya yang jelas. Mengenai tahapan awal dalam proses wawancara dilakukan dengan cara menyiapkan. Pedoman wawancara berisi beberapa pertanyaan yang terkait dengan rumusan masalah, kemudian menanyakan ketersediaan dan waktu luang informan untuk melaksanakan wawancara.

b. Observasi

Observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian jika penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala, serta bila sumber data yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2013). Menurut Sukmadinata Observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian jika penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala, serta bila sumber data yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2013).

Observasi yang dilakukan peneliti digunakan untuk mengamati bagaimana Peran Partai Politik Dalam Partisipasi Perempuan Di Kota Makassar (Kasus Partai Perindo Dan Partai PDIP). Dengan ini peneliti akan lebih mudah untuk menyinkronkan antara pernyataan informan dan realitas sosial yang terjadi sehingga menghasilkan data yang akurat.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan proses mencari, membaca, memahami, dan menganalisis literatur bacaan. Adapun tujuan dari penggunaan studi pustaka bagi peneliti yaitu dapat memberikan dan menambah pengetahuan atau pemahaman peneliti terhadap permasalahan yang sedang diteliti (Martono, 2015). Untuk itu dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka yang bersumber dari buku, jurnal, dan skripsi yang dapat diakses secara online sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2.6 Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2019) mendefinisikan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu terdiri dari *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification*.

A. Data Reduction / Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2019) *data reduction* atau reduksi data memiliki makna merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan karena data yang telah terkumpul di lapangan, perlu adanya upaya untuk mereduksi data sebab bisa jadi jumlah data yang didapatkan di lapangan jumlahnya cukup banyak. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik misalnya seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Redaksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikannya dengan seseorang yang dipandang lebih ahli. Melalui diskusi tersebut, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan (Sugiyono, 2019).

B. Display Data / Penyajian Data

Setelah melakukan redaksi data terhadap data-data yang telah didapatkan dari lapangan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu *display* data atau penyajian data. Penyajian data adalah ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya (Sugiyono, 2019).

Namun menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2019) yang paling sering digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif yang berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali (Rijali, 2019).

Adapun tujuan melakukan *display* data atau penyajian data adalah agar peneliti yang melakukan penelitian lebih mudah untuk memahami apa yang sedang terjadi. Hal ini berkaitan dengan apa yang diutarakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2019) bahwa dalam penelitian kualitatif, *display* data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

C. Conclusion Drawing / Verification

Setelah melakukan penyajian data langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah *conclusion drawing/ verification* atau penarikan kesimpulan atau verifikasi. Menurut Sugiyono (2019) bahwa kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat serta mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya. Namun sebaliknya, jika kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan suatu kesimpulan yang kredibel. Dalam penelitian kualitatif untuk menjawab masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti ada di lapangan (Sugiyono, 2019).